

KPK Jebloskan Eks Hakim Yustisial MA dan Staf Hakim Agung ke LP Sukamiskin

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung (MA), Elly Tri Pangestuti, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selain Elly, staf Hakim Agung Gazalba Saleh, Redhy Novarisza, juga dijebloskan ke lapas yang sama.

Eksekusi terhadap keduanya dilakukan oleh Tim Jaksa Eksekutor KPK dilaksanakan pada 19 Maret 2024.

"Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang berkekuatan hukum tetap," ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (24/3).

Sebagai informasi, Redhy akan menjalani masa kurungan selama delapan tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Dia juga masih harus membayar denda Rp1

miliar subsider enam bulan kurungan.

"Ditambah membayar uang pengganti 35 ribu dollar Singapura dan Rp 60 juta," kata Ali.

Sementara itu, Elly akan menjalani masa pidana badan selama dua tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp 50 juta.

"Ditambah membayar uang pengganti 10 ribu dollar Singapura," ujar Ali.

Perkara yang menjerat Elly dan Redhy, merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyangkut suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana pada 2022 lalu.

Perkara itu terus dikembangkan hingga jumlah tersangka menjadi belasan orang dan menyeret Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. ● mei

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 Mulai 27 Maret 2024

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa/perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024, mulai Rabu (27/3). Hal itu termuat dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024.

"Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon," demikian bunyi beleid yang diteken Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sebelum membacakan putusan.

Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024, tetapi waktu 14 hari kerja itu sudah mulai berjalan per 25 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Sebagai informasi, Anies-Muhaimin menjadi pasangan pertama yang mendaftar yakni pada

hari pertama pendaftaran gugatan sengketa pada Kamis (21/3). Sementara itu, Ganjar-Mahfud mendaftarkannya pada Sabtu (23/3).

Keduanya sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran. Di samping itu, mereka juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 360 Tahun 2024, pasangan Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional. Kemudian, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional. ● han



SOSIALISASI PENYELENGGARAAN WORLD WATER FORUM KE-10

Logo World Water Forum ke-10 2024 terpampang di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/3). Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 dengan tema Water For Shared Prosperity yang akan digelar pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

Partai Nasdem Diprediksi akan Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

JAKARTA (IM) - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, Partai Nasdem sudah menganggap Pilpres 2024 selesai, dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang.

Adi menilai, pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (22/3) kemarin merupakan kode keras bahwa Nasdem akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Seperti diketahui, Nasdem merupakan partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Itu kode keras Nasdem bakal berkoalisi dengan Prabowo. Apalagi sebelumnya Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat ke paslon 2. Apalagi dalam pertemuan itu Prabowo secara gamblang mengungkapkan keinginannya mengajak

Nasdem berkoalisi. Jawaban Nasdem fifty-fifty," ujar Adi saat dimintai, Minggu (24/3).

Karpet merah yang disediakan Nasdem ketika Prabowo berkunjung juga merupakan bentuk pengakuan bahwa Prabowo adalah presiden terpilih. Dia menegaskan pengakuan Nasdem atas kemenangan Prabowo ini sangat penting.

"Pada level Prabowo itu sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas Nasdem sebagai partai non paslon 2 pertama yang menerima dan mengakui kemenangan Prabowo di pilpres. Pengakuan Nasdem atas kemenangan Prabowo penting di tengah gugatan ke MK oleh paslon 1 dan 3," tuturnya.

"Dalam konteks ini bagi NasDem game over, pilpres sudah usai. Prabowo pemenangnya. Secara eksplisit Nasdem ingin menyampaikan ini," sambung Adi. ● mei

2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



PELANTIKAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Hasyim Asy'ari (ketiga kanan) bersama jajaran Komisioner KPU melantik sejumlah anggota KPU di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (24/3). KPU melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota KPU Provinsi Maluku dan 37 anggota KPU kabupaten/kota di 10 provinsi periode 2024-2029.

LPSK Siap Lindungi Saksi Gugatan Hasil Pilpres 2024 yang Diintimidasi

Kubu Anies – Muhaimin Iskandar dan Ganjar – Mahfud MD meminta capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo - Gibran, didiskualifikasi.

JAKARTA (IM) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo memastikan bahwa pihaknya siap melindungi saksi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang mendapat

ancaman.

Perlindungan itu dapat diajukan tanpa harus mendapat rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak perlu (rekomendasi MK), yang penting ada intimidasi dan kita yakin dia

memang alami itu kita akan lindungi," kata Hasto kepada wartawan dikutip, Minggu (24/3).

Walaupun hingga saat ini, LPSK belum menerima adanya pengajuan permohonan terkait perlindungan dari saksi PHPU. LPSK sangat terbuka jika nantinya ada permohonan perlindungan.

Prosedurnya, korban dapat mengajukan permohonan perlindungan. Yakni dengan membawa bukti laporan kepolisian guna menunjukkan

adanya dugaan terjadi tindak pidana pengancaman.

"Enggak ada sebenarnya peranan LPSK dalam kasus Pemilu, karena itu bukan ranah LPSK. Tapi kalau ada ancaman yang sampai mengancam jiwa dan sebagainya baru LPSK bisa," tutur Hasto.

Diketahui, informasi terkait adanya intimidasi terhadap para saksi gugatan hasil Pilpres 2024 mencuat usai proses pendaftaran gugatan Tim Pemenangan Nasional (TPN) nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan ada sejumlah saksi terkait gugatan PHPU mereka yang ketakutan sehingga enggan bersaksi.

"Kita punya saksi tapi banyak juga saksi yang ketakutan. Tapi kan tentu kita tidak bisa mendapatkan semua saksi yang kita minta," ucap Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Rabu (20/3).

Anies-Muhaimin men-

jadi pasangan pertama yang mendaftarkan gugatan sengketa pada hari pertama, Kamis (21/3). Sementara itu, Ganjar-Mahfud mendaftarkannya pada Sabtu (23/3).

Keduanya sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran. Di samping itu, mereka juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 360 Tahun 2024, pasangan Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional. Kemudian, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional. ● han

Sekjen KPK akan Tentukan Sanksi untuk 76 PNS yang Terlibat Pungli di Rutan

JAKARTA (IM) - Tim Pemeriksa dari Inspektorat, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), atasan langsung pegawai, dan Koordinator Bagian Pengamanan, Peraturan Pemerintah Korupsi (KPK), telah memeriksa 76 pegawai negeri sipil (PNS) terkait pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilakukan mulai 26 Februari lalu hingga 21 Maret.

"Pemeriksaan disiplin terhadap 76 orang PNS KPK sebagai terduga pelanggaran disiplin PNS," kata Ali kepada wartawan, Minggu (24/3).

Tim Pemeriksa akan menyusun laporan hasil pemeriksaan guna diserahkan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa. Adapun Sekjen merupakan Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK). Dengan mengacu pada laporan tersebut, PPK akan memutuskan sanksi disiplin bagi PNS yang terlibat pungli sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

PPK hanya bisa menjatuhkan sanksi disiplin kepada pegawai KPK yang telah menyanggah status PNS.

"Sedangkan pegawai yang bersumber dari instansi lain (PNYD), selanjutnya akan dikoordinasikan ke instansi asalnya," tutur Ali.

Sebelumnya, KPK mengusut kasus pungli di rutan sendiri dari tiga sisi yakni, etik, pidana, dan disiplin. Pelanggaran etik pungli diusut Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka telah menyidangkan 90 pegawai. Dalam putusannya, mereka menjatuhkan sanksi berat kepada 78 orang.

Sementara, 12 orang lainnya tidak masuk ke-

wenangan Dewas karena melakukan pungli ketika lembaga itu belum dibentuk. Dari 78 orang itu, sebanyak 76 di antaranya merupakan PNS di KPK, 1 PNYD dari Polri, dan 1 pegawai lain yang melakukan pungli sebelum diangkat menjadi PNS.

Sementara itu, dalam perkara pidananya KPK telah menetapkan 15 orang tersangka, termasuk Kepala Rutan Cabang KPK Achmad Fauzi. Ia tercatat sebagai PNYD dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). M

Mereka diduga mengumpulkan uang pungli dari para tahanan korupsi dengan nilai mencapai Rp 6,3 miliar sejak 2019 sampai 2023. Mereka disangka melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. ● han

PPP Gugat Hasil Pemilu 2024, Ngaku Kehilangan 200 Ribu Suara di 18 Provinsi

JAKARTA (IM) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengajukan gugatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (23/3) malam.

Gugatan dilayangkan karena partai berlambang Kakkah mengklaim banyak suaranya yang hilang Perolehan suara PPP dicuri saat proses rekapitulasi sehingga hasil akhirnya tak lolos ambang batas parlemen.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan, gugatan tersebut dilatarbelakangi adanya indikasi suara partai PPP yang hilang di sejumlah provinsi. Padahal menurut survei internal, PPP mengklaim mendapatkan 6,6 juta suara sehingga seharusnya menembus ambang batas atau presidential threshold sekitar 4,4 persen.

"Terlihat suara PPP yang patut diduga hilang di sejumlah pemilihan sehingga menyebabkan angka kami di dalam rekapitulasi KPH itu hanya menembus angka 3,87 persen, artinya di bawah ambang batas," kata Baidowi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).

"Kita lebih dari 6 juta, sudah diatas 4,4 persen, hampir 4,1 lah, 4,0 sekian lah, sekitar itulah," ucapnya.

Awiek, sapaan akrab Baidowi, mengatakan, suara PPP diduga hilang di 18 provinsi di Indonesia. Dari 18 provinsi itu, terdapat 30 daerah pemilihan yang terindikasi adanya suara PPP

yang hilang.

"Gugatannya cukup banyak ada di 18 provinsi. Ada sejumlah dapil, kalau nggak salah ada sekitar 30-an dapil ya," jelasnya.

Dia mengklaim PPP mempunyai seluruh bukti dugaan suara hilang di 18 Provinsi itu berdasarkan penelusuran tim hukum. Adapun total suara yang hilang ditaksir lebih dari 200.000 suara.

"Tidak banyak di dapil itu paling 3.000-4.000 (suara hilang), tetapi terjadi di sepanjang dapil. Sehingga ketika ditotal itu lebih dari 200 ribu, nah itu yang terlacak," ucapnya.

PPP berharap hilangnya 200.000 suara itu bisa dikembalikan. Ratusan ribu suara yang hilang itu diklaim bisa membuat PPP lolos dari ambang batas parlemen.

Sebagai informasi, suaranya sah pada Pemilu 2024 berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 1.515.796.631. Dalam penetapan hasil itu, PPP memperoleh suara sebanyak 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Adapun jika PPP berhasil membuktikan terdapat sebanyak 200.000 suara yang hilang, maka PPP memperoleh suara sebanyak 6.078.777. Dari hasil itu, maka PPP bisa dinyatakan tembus ambang batas lantaran suaranya menjadi 4,01 persen. ● han



**KECAMATAN PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN**

MENGUCAPKAN

MARHABAN YA RAMADHAN

Selamat Menunaikan

IBADAH PUASA

1445 H/ 2024 M




H. Mukroni, SE.M.Si.Kp
Camat Pamulang

Munadi, SE.M.Si
Sekcam Pamulang